

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)**

SKRIPSI



Oleh :

WINA ANJANI NUR HAYATI
NPM : 20300119

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM**

2024

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

WINA ANJANI NUR HAYATI

NPM: 20300119

SURABAYA, 10 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Umi Enggarsasi", written over a circular stamp.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Titik Suharti", written over a circular stamp.

DR. TITIK SUHARTI, S.H., M.Hum.

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG
TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT
DI SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU (SPKT)**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :

WINA ANJANI NUR HAYATI




NPM: 20300119

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 10 Januari 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|
| 1. Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.HUM. | (KETUA) | 1.....  |
| 2. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H.,M.H. | (ANGGOTA) | 2.....  |
| 3. Dr. TITIK SUHARTI, S.H., M.HUM | (ANGGOTA) | 3.....  |

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wina Anjani Nur Hayati
NPM : 20300119
Alamat : Jl. Ikan Mujaer No. 5-D Surabaya
No. Telp. (HP) : 082233259499

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Tidak Memberikan Pelayanan Pada Masyarakat di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan di jatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2024

Yang Menyatakan,



WINA ANJANI N.H)

NPM: 20300119

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT”** dengan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tentunya, dalam penulisan skripsi ini diperlukan usaha dan tekad yang kuat sehingga karya penulisan ini dapat diselesaikan dengan sempurna. Oleh karenanya, mengawali dengan penuh rasa hormat penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sangat mendalam dan tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. T.H.T.KL.(K) yang telah memberi kesempatan penulis untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama penulis mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Wijangkoro, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan pengarahan selama masa perkuliahan.
4. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberi pengarahan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
7. Untuk orang tua tercinta, Bapak Hermanto dan Ibu Widi, saudara- saudara saya (Kak Ajeng, Adek Iman, Adek Zizah), serta Keluarga Besar yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materil dan doa yang tidak pernah berhenti.
8. Teruntuk sahabat – sahabat saya yang telah memberikan dorongan moral dan dukungan penuh selama pengerjaan skripsi ini.
9. Teruntuk Herlambang Dirgantara. P. Yang telah memberi dukungan materil maupun immateril dan dorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu pengerjaan skripsi ini baik lewat pikiran, dorongan semangat.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membaca. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan syukur kepada ALLAH SWT.

Surabaya, 10 Januari 2024
Penulis

Wina Anjani Nur Hayati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Perumusan Masalah.....	8
III. Tujuan Penelitian.....	8
IV. Manfaat Penelitian	9
V. Kerangka Konseptual.....	9
VI. Metode Penelitian	18
VII. Pertanggungjawaban sistematika	20
BAB II PROSEDUR LAPORAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT	23
I. Prosedur Pembuatan Laporan Kepolisian di SPKT	23
II. Pelayanan Terhadap Masyarakat di SPKT	39
BAB III PENERAPAN SANKSI TERHADAP OKNUM POLISI YANG MENOLAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT ...	48
I. Sitem Pengawasan Internal Terhadap Oknum Polisi.....	48
II. Penerapan Sanksi terhadap Oknum Polisi	62
BAB IV PENUTUP.....

I. Kesimpulan80

II. Saran80

DAFTAR PUSTAKA _____

ABSTRAK

Penelitian dengan berjudul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM POLISI YANG TIDAK MEMBERIKAN PELAYANAN PADA MASYARAKAT DI SPKT. Bertujuan untuk mengetahui dan menambah pemahaman masyarakat mengenai bagaimana bentuk penegakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat. Selain itu untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana prosedur laporan Kepolisian dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Tidak hanya itu saja, ada tujuan lain yang mana untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana penerapan sanksi yang diberikan terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada masyarakat dengan baik. Karena disisi lain oknum polisi yang tidak profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya cukup marak terjadi. dengan begitu kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin menurun. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat merusak Citra Polri. Dalam kasus yang terjadi, banyak oknum polisi yang masih melanggar kode etik profesi Polri dengan tidak memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan Perundang-undangan dan literatur atau bahan bacaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan Kebijakan Hukum melalui pendekatan Peraturan Polri No. 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia untuk menanggulangi tindakan hukum terhadap oknum polisi yang tidak memberikan pelayanan pada Masyarakat sesuai dengan kode etik profesi Polri. Serta tata cara prosedur laporan Kepolisian yang sesuai dengan Peraturan Kepolisian No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kata Kunci :Polri, Pelayanan Masyarakat, Kode Etik Pofesi.

ABSTRACT

Research entitled LAW ENFORCEMENT AGAINST POLICE OFFICERS WHO DO NOT PROVIDE SERVICES TO THE COMMUNITY IN SPKT. The aim is to find out and increase public understanding regarding the form of law enforcement against police officers who do not provide services to the community. Apart from that, to find out and analyze the police reporting procedures in providing services to the community. Not only that, there is another aim which is to find out and analyze how the sanctions given to police officers who do not provide good services to the community are implemented. Because on the other hand, police officers who are not professional in carrying out their duties and obligations in the form of not providing good services to the community are quite common. So the public thinks that the National Police Agency does not provide an understanding of community services to its personnel, so that public confidence in the performance of the National Police is decreasing. This is considered dangerous because it can damage the image of the National Police. In cases that occur, many police officers still violate the National Police's professional code of ethics by not providing good service to the community.

The research method used in this thesis uses the Normative legal research method which is literature research, namely research on laws and regulations and literature or reading materials related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded that Legal Policy through the approach of Police Regulation No. 7 of 2022 concerning the Code of Ethics and the Republic of Indonesia Police Code of Ethics Commission to handle legal action against police officers who do not provide services to the community in accordance with the National Police's professional code of ethics. As well as the Police reporting procedures in accordance with Police Regulation no. 6 of 2019 concerning Criminal Investigation.

Keywords : *Police, Public Service, Professional code of ethics.*